



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 21
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan;
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 9 Juli 2018
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Penjelasan Dirut BPJS Ketenagakerjaan mengenai target perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2018 terhadap pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan strategi pencapaiannya; 2. Penjelasan Dirut BPJS Ketenagakerjaan mengenai upaya Perluasan manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan; 3. Penjelasan Dirut BPJS Ketenagakerjaan mengenai kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan layanan terhadap pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Ketua Rapat	: DR. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. 18 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI, 1 orang Izin; B. Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, MM beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dibuka pukul 14.20 WIB, setelah kuorum terpenuhi

sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat melakukan upaya yang lebih optimal dalam meningkatkan kepesertaan di sektor Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) agar sesuai dengan peta jalan kepesertaan BPU dalam memperbaiki sistem operasional kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih banyak memberikan perluasan manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan di bidang pendidikan dan pelatihan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada peserta, sesuai aturan perundangan yang berlaku.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat meningkatkan layanan terhadap pekerja migran Indonesia mengingat perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Mei 2018 masih sangat rendah.
4. Komisi IX DPR RI meminta Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI hari ini, tanggal 9 Juli 2018 dan jawaban tersebut diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 16 Juli 2018.

Rapat diakhiri pukul 16.45 WIB.

Ketua Rapat/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,


DR.H.SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, MA

A-460